

KAJIAN PENYUSUNAN KRITERIA-KRITERIA DESA WISATA SEBAGAI INSTRUMEN DASAR PENGEMBANGAN DESAWISATA

I Nyoman Sukma Arida^{1*} dan LP.Kerti Pujani¹

1. Program Studi S1 Destinasi Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar, Bali

*E-mail : sukma.arida@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengungkapkan tentang proses pemverifikasian desa wisata dengan menggunakan seperangkat instrumen kriteria desa wisata. Lokasi penelitian adalah sembilan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Gianyar. Dengan menggunakan seperangkat instrument kriteria desa wisata, team peneliti melakukan proses verifikasi untuk melakukan pemetaan desa wisata yang ada dalam delapan aspek. Hasil penelitian menunjukkan dari sembilan desa wisata yang ada memiliki potensi yang sangat beragam untuk dikembangkan menjadi desa wisata yang unggul. Sembilan desa yang diverifikasi terpilah dalam dua kategori yaitu empat desa termasuk ke dalam kategori Sangat Memenuhi (Kemenuh, Taro, Singapadu Tengah, dan Kerta) dan lima desa termasuk ke dalam kategori Memenuhi (Singapadu Kaler, Batubulan, Kedisan, Mas, dan Kendran). Dalam proses berikutnya Kriteria Desa wisata yang dihasilkan ini juga digunakan dalam proses Verifikasi Desa wisata di dua kabupaten lainnya, yaitu: kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem. Dengan demikian hasil-hasil penelitian Hibah Unggulan Program Studi ini telah melalui proses hilirisasi hasil riset sesuai amanat Dirjen Penguatan hasil Riset Dikti RI.

Kata kunci : desa wisata, kriteria, pengembangan.

PENDAHULUAN

Keberadaan desa wisata dalam perjalanan pembangunan pariwisata di Tanah Air sudah sedemikian penting. Ia sudah mampu mewarnai variasi destinasi yang lebih dinamis dalam suatu kawasan pariwisata sehingga pariwisata tidak selalu terjebak dalam trend pengembangan bercorak masstourism. Dalam konteks kepariwisataan Bali perkembangan desa wisata menjadi bagian tak terpisahkan dari pasang-surut perkembangan pariwisata. Melalui desa wisata, pariwisata membuktikan keberpihakannya kepada semangat pro job, pro growth, dan pro poor (pariwisata sebagai penyerap tenaga kerja pedesaan, sebagai generator pertumbuhan ekonomi wilayah, dan sebagai alat pengentasan kemiskinan).

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat, melalui Kementerian Pariwisata Kabinet Kerja (2015-2019) telah menetapkan bahwa program pengembangan desa wisata menjadi salah-satu agenda prioritas. Dalam konteks ini, Propinsi Bali memperoleh kesempatan

mengembangkan 100 desa wisata baru dengan dukungan pendanaan dari APBN hingga tahun 2018. Tentu saja ini sebuah peluang yang tidak boleh disia-siakan. Namun, di balik peluang tersebut pengembangan desa wisata yang selama ini berlangsung masih dihadapkan pada sejumlah persoalan. Pertama, persoalan belum adanya kriteria desa wisata yang bersifat standard yang bisa dijadikan acuan manakala melakukan pemetaan terhadap desa-desa wisata. Sehingga pengembangan sebuah desa cenderung bersifat duplikasi, yakni mengacu kepada desa wisata yang telah ada sebelumnya, tidak mengangkat keunikan lokal. Kedua, belum adanya model pengembangan desa wisata yang dapat berfungsi sebagai cetak biru (blue print), khususnya dalam hal pengembangan kelembagaan lokal, yaitu pengelola desa wisata. Pengaruh pengelolaan desa wisata dalam menjamin kesuksesan pengembangan desa wisata memang teramat vital. Absennya dua hal tersebut, membuat pengembangan desa wisata menjadi tersendat dan terkesan berjalan ala kadarnya.

Desa wisata Penglipuran di Bangli, misalnya, setelah diluncurkan pada tahun 1993, dalam proses perjalanannya berhasil tampil menjadi salah-satu destinasi unggulan dan andalan Kabupaten Bangli dalam menarik kunjungan wisatawan. Beberapa desa lainnya pun akhirnya dicoba dibangun dan dikembangkan meniru proses perkembangan Desa Penglipuran. Terjadi proses duplikasi secara sengaja dengan mengabaikan otentisitas potensi dan keunikan sendiri. Desa Baha di kabupaten Badung yang secara tiba-tiba ditetapkan sebagai desa wisata oleh Pemda Kabupaten Badung, misalnya, meniru begitu saja pola pembangunan angkul- angkul (pintu gerbang pekarangan tradisional Bali) yang ada di Penglipuran. Terbukti akhirnya, hal tersebut tidak membawa hasil yang memuaskan, Desa Baha tidak bisa berkembang secara optimal sebagai desa wisata padahal sudah digelontorkan sejumlah dana APBD.

Satu hal penting yang diabaikan dalam pengembangan desa wisata adalah persoalan kapasitas kelembagaan pengelola desa wisata. Pengembangan desa wisata di Bali selama ini terkesan belum memiliki pendekatan yang kuat. Padahal hasil pengkajian di beberapa negara pendekatan tersebut telah menghasilkan beberapa bentuk pendekatan. Pendekatan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan lokal (pemerintah daerah dan masyarakat) memiliki spektrum konsep dan pendekatan yang bervariasi. Ada lima aspek yang ingin dikemukakan disini (Baiquni 2009), antara lain :

Holistic approach. Pendekatan ini melihat secara menyeluruh dimensi pembangunan atau secara holistik. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan berbagai elemen atau sektor pembangunan secara terpadu, sehingga perumusan masalah dan pemecahannya diselenggarakan secara kolektif dan partisipatif. Metode yang digunakan adalah system thinking sebagai cara untuk membuka pemahaman dan melakukan inovasi dalam merumuskan konteks kebijakan dan pengembangan yang tepatguna.

Participatory learning. Pendampingan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan lokal perlu dilakukan secara partisipatif, menggali bersama kebutuhan dan merumuskan prioritas penanganan dalam proses 'belajar bersama'. Sesungguhnya yang paling tahu persoalan adalah pelaku lokal (masyarakat dan pemerintah daerah) sendiri, bukan konsultan

atau kontraktor pembangunan yang berasal dari luar dan memiliki kepentingannya sendiri. Peran konsultan pada penguatan proses memfasilitasi pembelajaran kolektif, sehingga pemahaman permasalahan akan lebih baik dan solusinya dapat dikerjakan bersama-sama sesuai fungsi masing-masing lembaga dalam tata manajemen. Metode yang digunakan sarsehan, lokakarya dan learning by doing.

Empowerment of management. Proses pembelajaran tersebut mencakup individual dan institusional yang oleh Ki Hajar Dewantoro disebut Triple A (Asih, Asah dan Asuh) dalam proses belajar akan menimbulkan pencerahan (enlightment) dan penguatan atau pemberdayaan (empowerment). Kelembagaan yang kuat terdiri dari para pelakunya yang juga tercerahkan dalam belajar dan bekerja. Manajemen kelembagaan yang terus membangun pencerahan dan pemberdayaan akan memberikan perbaikan kinerja dalam pengembangan ekowisata.

Action research. Manifestasi aparatur yang tercerahkan dan kelembagaan yang mandiri, hanya teruji bila telah melakukan tindakan nyata dan bermanfaat bagi lingkungannya. Riset aksi merupakan bagian yang saling melengkapi dalam pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan. Metode riset aksi dilakukan melalui proses pembelajaran dapat diperkaya dengan pengalaman lapangan.

Sinergy and network. Pendekatan yang penting dalam peningkatan kapasitas kelembagaan adalah kesediaan untuk membuka jaringan dan bekerja secara jejaring dengan segenap komponen kelembagaan baik yang ada dilingkungan pemerintah eksekutif, legislatif dan yudikatif, maupun kelembagaan masyarakat dan bisnis. Sinergi dan jejaring merupakan upaya untuk mewujudkan tugas dan menjawab tantangan pembangunan secara bersama, menciptakan keseimbangan check and balance, dan membangun trust diantara pelaku pembangunan ekowisata.

Orientasi pengembangan desa wisata seyogyanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya ini perlu kesabaran dalam melakukan pengkajian, perencanaan, pengembangan dan pemanfaatan secara wajar dan adil, baik terhadap alam maupun manusianya. Tidak hanya manusia yang memiliki hak, juga alam lingkungan memiliki hak yang harus dan wajib ditunaikan oleh manusia yang memanfaatkannya. Optimalisasi daya dukung memerlukan pemahaman yang baik

mengenai karakter, dinamika dan kecenderungan yang berkembang. Ini perlu dicermati dan diikuti, sehingga perkembangan itu mengarah pada kelestarian, bukan kerusakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Inskeep(1991) dengan sangat baik mengungkapkan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Terkait dengan konsep pengembangan desa wisata, Pearce (1995) mengartikan pengembangan desa wisata sebagai suatu proses yang menekankan cara untuk mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara lebih spesifik, pengembangan desa wisata diartikan sebagai usaha-usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Desa wisata, sebagai salah satu bentuk dari pariwisata pedesaan dapat memberikan banyak manfaat kepada upaya pengembangan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah pedesaan (Sugiarti,2008). Berbagai potensi tersebut dapat menjadi daya tarik wisata yang dapat memberikan pengalaman autentik kepada wisatawan dan sekaligus memberikan Kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui pariwisata. Pengembangan desa wisata dengan demikian dapat menjadi salah-satu upaya untuk menumbuhkan potensi kewirausahaan lokal, mendiversifikasi produk pariwisata, menopang perekonomian masyarakat setempat, serta merevitalisasi budaya lokal.

Dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi wilayah, pengembangan desa wisata disinyalir dapat mengatasi urbanisasi dan mendorong perekonomian pedesaan. Di samping itu pariwisata pedesaan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Sebagai salah-satu bentuk pariwisata alternatif, desa wisata dapat menjadi alat yang potensial untuk menunjang pembangunan lingkungan yang berkesinambungan (Oppermann, 1996; Crotts dan Holland,1993). Selain menimbulkan dampak positif, pengembangan desa wisata yang kurang terkontrol juga bisa memunculkan dampak negatif terhadap lingkungan pedesaan. Dampak tersebut antara lain

adalah meningkatnya tekanan terhadap lingkungan akibat pembangunan infrastruktur dan pengadaan fasilitas untuk menunjang kegiatan desa wisata(Page and Gertz,1997).

Program pengembangan desa wisata tidak saja bertujuan untuk mendorong masyarakat desa dalam mengelola potensi alam serta budayanya secara kreatif sehingga menghasilkan manfaat ekonomi, namun lebih daripada itu ia juga bertujuan untuk menyiapkan masyarakat dalam menghadapi persaingan global (Rahman, 2009). Dengan kata lain, pengembangan desa wisata memiliki tujuan utama untuk membangun masyarakat desa agar memiliki ketahanan budaya dan ekonomi. Dengan dukungan ekonomi atau modal yang memadai, masyarakat desa akan dapat mempertahankan dan mengembangkan warisan budayanya. Dengan demikian dalam pengembangan desa wisata yang berkarakter 'pro-rakyat' tujuan dan targetnya adalah memberikan kesempatan atau mendorong masyarakat agar lebih aktif, kreatif, dan pro-aktif dalam mengembangkan dan mengelola daya tarik wisata di daerahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata merupakan salah satu bentuk Wisata Pedesaan. Wisata pedesaan merupakan perjalanan yang berorientasi menikmati suasana kehidupan yang pedesaan, menghormati serta memperoleh nilai tambah hidup dari budaya dan tradisi masyarakat setempat serta lingkungan alam, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dan lingkungannya merupakan obyek dan daya tarik wisata. Lingkup desa wisata dapat berupa alam seperti gunung, persawahan, hutan, tebing, bentang alam, flora dan fauna, juga taman laut; budaya seperti peninggalansejarah, adat istiadat, tradisi, kehidupan sehari-hari, dan karya arsitektur; atau berupa *saujana*, yaitu karya budaya (benda) yang 'menyatu' dengan bentang alam.

Karena itu perlu dipahami *kriteria dasar* pengembangan desa wisata antara lain : a) keberadaan obyek dan daya tarik: desa memiliki obyek daerah tujuan wisata, paling sedikit berdekatan dengan suatu obyek daerah tujuan wisata yang sudah terkenal, sehingga dapat dikaitkan dengan paket perjalanan yang sudah ada, b) memiliki akses fisik dan akses pasar, c) memiliki potensi kemitraan, d) adanya motivasi dan antusiasme masyarakat, dan, e) tersedianya fasilitas umum minimal. Namun kriteria ini

nampaknya belum cukup operasional untuk diimplementasikan dalam memetakan dan melakukan tipologisasi terhadap desa-desa wisata yang terdapat di Bali.

Selain itu, pengembangan wisata pedesaan selayaknya memenuhi prinsip perencanaan sebagai berikut: a) memperhatikan karakteristik lingkungan setempat, b) menekan sekecil mungkin dampak negatif pengembangan kepariwisataan di desa tersebut, c) materi yang digunakan sesuai dengan lingkungan setempat, d) bahan-bahan operasional yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang atau hasil daur ulang serta memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebab wisata pedesaan bukan *mass tourism*, dan e) melibatkan masyarakat desa dengan menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku kegiatan kepariwisataan, yaitu menjadi pemilik langsung/tak langsung desa wisata tersebut dan kepemilikan atas tanah tidak dialihkan.

Kriteria-Kriteria Desa Wisata

Seringkali pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, mengalami kebingungan dalam melakukan seleksi terhadap puluhan calon desa wisata yang ada di wilayahnya. Pertanyaannya adalah; apakah yang bisa dijadikan tolok ukur dalam meloloskan atau menolak sebuah desa untuk ditetapkan sebagai desa wisata? Pihak aparat

di Dinas Pariwisata Kabupaten seringkali gamang (dilematis) bila dihadapkan pada sejumlah pertanyaan mendasar soal kriteria apakah yang dipergunakan dalam menyeleksi calon-calon desa wisata tersebut? Penyusunan kriteria desa wisata ini adalah dalam upaya menjawab kegamangan pihak Dinas Pariwisata tersebut, yang mungkin juga menjadi kegelisahan para pemangku kepentingan desa wisata yang lainnya.

Sebagai instrument untuk melakukan verifikasi faktual terhadap sembilan desa wisata di Gianyar, peneliti menyusun kriteria desa wisata yang terdiri dari delapan aspek, antara lain; aspek alam/bio hayati, aspek lingkungan fisik, aspek budaya, aspek amenitas/prasarana, aspek SDM, aspek kelembagaan, sikap dan tata kehidupan masyarakat, dan aksesibilitas. Ke delapan aspek memiliki jumlah kriteria yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat urgensi masing-masing aspek (lihat Matrik 1). Demikian pula, masing-masing kriteria memiliki skor maksimal yang berbeda sesuai dengan bobotnya masing-masing. Proses terwujudnya kriteria desa wisata sebagai instrument verifikasi desa wisata ini melewati proses diskusi yang intensif dengan sejumlah pakar dan praktisi pariwisata, khususnya desa wisata.

Matrik 1. Kriteria Desa Wisata

A	A L A M/BIO HAYATI	Skor maksimal
1	Terdapat lanscape alam/geografis yang unik dan indah (terasering sawah, perkebunan, lembah, air terjun, gumuk pasir, dll)	4
2	Terdapat fenomena hayati yang unik (goa kelelawar, hutan burung, dll)	3
3	Terdapat flora/tumbuhan yang endemik dan unik	3
4	Terdapat fauna/satwa yang endemik dan unik	3
5	Ada kemudahan mengamati satwa liar	2
6	Terdapat mata air(pancuran/beji)	2
7	Masyarakat memanfaatkan beji untuk kepentingan pariwisata	2
8	Terdapat tanaman langka	3
9	Terdapat kebun tanaman upakara	3
10	Warga memanfaatkan tanaman upakara sebagai bahan upacara adat (artinya, tingkat ketergantungan ke wilayah luar desa kecil)	2
11	Terdapat kebun tanaman obat/usada	3
12	Ketersediaan informasi yang akurat tentang vegetasi	3
13	Terdapat peluang untuk lintas alam (trekking,rafting,snorkeling,dll)	2
14	Suhu dan kelembaban udara yang nyaman	2
15	Curah hujan yang normal	2

16	Limbah industri kecil terkelola dengan baik	3
	JUMLAH	42
B LINGKUNGAN FISIK		
1	Lingkungan fisik relatif masih alami	3
2	Memiliki persawahan atau perkebunan yang masih dominan	2
3	Laju alih fungsi lahan sawah relatif terkontrol	3
4	Memiliki sistem pengolahan sawah/kebun secara organik	4
5	Badan air (sungai, telabah) terjaga dari polusi	2
6	Terdapat warga masyarakat yang memanfaatkan badan air untuk kegiatan produktif ramah lingkungan, misalnya memelihara ikan air tawar.	2
7	Terdapat lapangan olahraga atau alun-alun desa	2
8	Terdapat peta desa yang secara akurat mendeskripsikan potensi lokal.	4
9	Memiliki pembagian wilayah ke dalam tiga zone, yaitu; utama mandala (konservasi murni), madya mandala(pemanfaatan terbatas), nista mandala (pemanfaatan)	3
10	Memiliki pengaturan ruang desa tertulis (zonasi) yang telah tersosialisasikan kepada warga.	4
11	Terdapat pola pemukiman yang masih tradisional	3
12	Keberadaan telajakan di depan pekarangan masih dominan	2
13	Terdapat tanah adat berupa setra, hutan desa, dan laba pura.	2
14	Resiko bencana alam rendah (longsor, banjir, tsunami)	3
	JUMLAH	39
C BUDAYA		
1	Terdapat mitos/legenda desa	2
2	Terdapat ritual tradisi yg unik dan khas	4
3	Terdapat permainan tradisional yang masih hidup	2
4	Terdapat olah raga tradisional yang masih hidup	3
5	Terdapat bentuk kesenian tarian sakral yang masih hidup	4
6	Terdapat sekehe kesenian tari yang masih hidup	2
7	Terdapat atraksi kesenian yang memungkinkan wisatawan untuk terlibat. ¹	3
8	Terdapat sekehe kesenian karawitan/sekehe gong yang masih 'hidup'	2
9	Terdapat sekehe kidung (seni suara tradisional) yang masih 'hidup'	2
10	Terdapat sanggar tari Bali	2
11	Ada tokoh seniman tari yang masih aktif berkreatifitas	4
12	Pernah ada seniman tari berskala maestro yang saat ini telah meninggal, namun sejarah dan ketokohnya masih dirasakan masyarakat.	3
13	Terdapat warga yang berprofesi sebagai <i>usada</i> (healer)	3
14	Terdapat kuliner khas desa dengan bahan baku yang diperoleh dari desa setempat	2
15	Terdapat warga yang terampil mengolah olahan kuliner lokal (chef lokal), minimal 4 orang	3
16	Terdapat artefak sejarah berupa situs purbakala yg diakui Negara	4
17	Masyarakat memelihara artefak sejarah yang ada secara aktif	3
18	Ada pemahaman pada masyarakat tentang perlunya menyeimbangkan antara merawat seni dan mengkomersialkan seni	3
19	Ada aturan tegas dalam menjaga kesenian sacral	3

20	Terdapat pura kahyangan tiga dengan ornamen arsitektur Bali yang khas	3
21	Terdapat sistem siklus piodalan di pura yang dilakukan krama secara berkelanjutan dan mandiri	2
22	Terdapat aturan (<i>code of conduct</i>) perihal tata-cara memasuki pura secara tertulis yang telah disepakati oleh seluruh warga desa.	3
23	Lingkungan sekitar jabe sisi pura (area depan dan samping) tertata dengan asri, hijau, dan lapang.	2
24	Terdapat kelompok petani yang masih menggunakan bajak.	3
	JUMLAH	67
D AMENITAS/INFRA-STRUKTUR		
1	Terdapat rumah-rumah penduduk yang bisa dipakai sebagai homestay	3
2	Terdapat bangunan balai banjar yang bisa dimanfaatkan sebagai wahana desa wisata (kantor pengelola, tourism center,dll)	2
3	Terdapat toilet yang cukup layak di area balai banjar	2
4	Terdapat lahan parkir yang cukup luas (minimal untuk 5 mobil)	3
5	Terdapat jalan desa yang aman dan memadai	4
6	Terdapat sistem pengelolaan sampah desa secara mandiri	2
7	Terdapat pasar tradisional yang bersih dan nyaman	3
	JUMLAH	19
E KELEMBAGAAN		
1	Terdapat struktur dan perangkat banjar adat yang bekerja efektif	2
2	Terdapat awig-awig banjar/desa pakraman yang tertulis	2
3	Terdapat lembaga adat Kerta desa	2
4	Terdapat lembaga sabha desa	4
5	Terdapat struktur dan perangkat organisasi Subak yang bekerja efektif	2
6	Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja efektif	2
7	Terdapat sistem disaster mitigation berbasis lokal (kulkul)	2
8	Terdapat Lembaga Perkreditan Desa yang berkembang sehat dan dinamis	2
9	Terdapat koperasi banjar/desa yang bekerja secara efektif	2
10	Terdapat kelompok warga (sekehe) pengelola sampah/pemilah sampah yang telah berdiri minimal 6 bulan terakhir.	4
F SDM		
1	Terdapat warga masyarakat usia produktif yang cukup besar dan mukim di desa (> 30%)	2
2	Terdapat warga yang merupakan alumni sekolah SMK Pariwisata (minimal 2 orang)	2
3	Terdapat warga yang menguasai bahasa asing	2
4	Terdapat warga yang pernah bekerja di sektor pariwisata (hotel, restoran, travel,dll)	2
5	Terdapat kelompok warga perempuan yang memiliki aktifitas kelompok yang berkelanjutan (PKK, arisan, kesenian).	3
6	Terdapat sejumlah warga yang bekerja pada unit-unit usaha yang dibentuk oleh desa/banjar adat (misalnya LPD, koperasi, kelompok sampah, pasar desa).	2
7	Terdapat sejumlah warga yang menjadi pengerajin berbasis tradisi (ukiran, undagi,pande, pembuat alat upacara, pakaian, kuliner tradisional, dll)	3
	JUMLAH	16

G SIKAP DAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT		
1	Warga memiliki persepsi positif terhadap pariwisata desa	2
2	Secara dominan warga memiliki pola pikir yang terbuka dan bersahabat dengan orang luar, khususnya wisatawan.	2
3	Masih ada sistem gotong-royong yang berlangsung secara berkelanjutan	2
4	Potensi konflik kecil	3
5	Terdapat sistem resolusi konflik internal (dadia, antar dadia, banjar)	3
6	Terdapat sistem resolusi konflik eksternal (pasuwitran nyatur desa)	3
7	Respek dan kepatuhan warga terhadap pemimpin banjar adat masih kuat.	3
8	Proporsi penduduk pendatang kecil (maksimal 25 %)	3
9	Terdapat sejumlah warga yang bergelut di sektor UKM (pedagang, UKM)	3
10	Memiliki Jenis Partisipasi Aktif	3
JUMLAH		27
H AKSESIBILITAS		
1	Jalan penghubung ke wilayah luar dalam kondisi baik	2
2	Jarak ke pusat kota kabupaten cukup dekat	2
3	Tidak dilewati jalur jalan lintas propinsi yang ramai	2
4	Memiliki moda transportasi local	3
5	Kepemilikan mobil pribadi relatif rendah	3
JUMLAH		12

Verifikasi Desa Wisata Gianyar

Dari sembilan desa wisata di Gianyar yang diverifikasi/dikaji, akhirnya diperoleh tabulasi hasil verifikasi desa wisata (Matrik 2). Hasil penilaian secara lengkap tiap-tiap desa bisa disimak dalam laporan akhir HUPS yang disusun tim peneliti. Dari matrik terlihat bahwa Desa Kemenuh memperoleh skor penilaian tertinggi (211) dan skor terendah diraih oleh desa Kendran (179). Selain itu dari hasil penilaian dapat dilihat bahwa ada empat desa tergolong ke dalam kategori Sangat Memenuhi dan lima desa tergolong ke dalam kategori Memenuhi. Selanjutnya dari hasil verifikasi tersebut bisa

dimunculkan program dan strategi pengembangan yang sesuai dengan hasil verifikasi tersebut.

Hasil verifikasi yang sudah dilakukan menjadi dasar yang penting dan dituangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar dalam Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata kabupaten Gianyar. Sementara itu dua kabupaten yang lain, yaitu Kabupaten Badung dan Karang Asem juga memakai Kriteria Desa Wisata yang dihasilkan ini sebagai instrument dalam melakukan verifikasi terhadap desa-desa wisata di kedua kabupaten tersebut.

Matrik 2 Tabulasi Verifikasi Desa Wisata Kab. Gianyar

Aspek	Kemenuh	Taro	Singapadu Tengah	Kerta	Singapadu Kaler	Batubulan	Kedisan	Mas	Kendran
Alam/bio hayati	27	40	21	34	20	17	24	18	21
Lingkungan Fisik	29	24	29	34	28	26	29	21	34
Budaya	63	47	58	40	56	61	49	55	40
Infrastruktur	17	16	12	14	14	13	14	18	11
Kelembagaan	22	24	23	18	23	19	15	20	22
SDM	14	16	16	14	16	14	16	16	15

Sikap&TKM	23	23	25	24	20	22	24	23	23
Aksesibilitas	16	10	15	15	13	17	13	11	13
Skor Total	211	200	199	193	190	189	184	182	179
KATEGORI	SM	SM	SM	SM	M	M	M	M	M

Range Skor :

- Sangat memenuhi : 191-254
- Memenuhi : 127-190
- Cukup memenuhi : 64-126
- Kurang memenuhi : 0-63

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kriteria desa wisata sebagai instrument untuk melakukan verifikasi desa wisata yang dihasilkan dalam penelitian ini terdiri dari delapan aspek, antara lain; (1) aspek alam/bio hayati, (2) aspek lingkungan fisik, (3) aspek budaya, (4) aspek amenitas/prasarana, (5) aspek Sumber Daya Manusia (SDM), (6) aspek kelembagaan, (7) sikap dan tata kehidupan masyarakat, dan (8) aspek aksesibilitas. Ke delapan aspek memiliki jumlah kriteria yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat urgensi masing-masing aspek. Sedangkan, masing-masing kriteria memiliki skor maksimal yang berbeda sesuai dengan bobotnya masing-masing.
2. Sembilan desa wisata di Kabupaten Gianyar yang diverifikasi dalam penelitian ini terpilah dalam dua kategori yaitu empat desa termasuk ke dalam kategori Sangat Memenuhi (Kemenuh, Taro, Singapadu Tengah, dan Kerta) dan lima desa termasuk ke dalam kategori Memenuhi (Singapadu Kaler, Batubulan, Kedisan, Mas, dan Kendran). Desa dengan skor tertinggi diraih oleh Desa Kemenuh, dan desa dengan skor terendah diraih oleh desa Kendran, Tegallalang.
3. Hasil penelitian ini sesungguhnya telah melalui proses 'hilirisasi hasil riset' karena telah dipergunakan oleh tiga kantor Dinas Pariwisata Kabupaten di Bali sebagai landasan dalam menyusun kebijakan pariwisata, yakni: kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Karangasem, melalui kegiatan Kajian Potensi Desa Wisata. Khusus untuk Kabupaten Gianyar bahkan sudah dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati. Sedangkan di kabupaten Badung hasil

kajian kriteria desa wisata sedang berproses menjadi produk hukum berbentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

Saran

1. Intervensi program pemberdayaan terkait peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan sikap dan tata kehidupan masyarakat sebaiknya diarahkan pada desa-desa yang masih memiliki skor yang rendah dalam *tiga* aspek tersebut (misalnya: desa Singapadu Kaler dan desa Kedisan).
2. Intervensi program peningkatan fasilitas fisik, aksesibilitas, dan infrastruktur sebaiknya diarahkan pada desa-desa yang masih memiliki skor yang rendah dalam aspek-aspek tersebut (misalnya: desa Kendran, desa Singapadu Tengah, dan desa Taro).
3. Lokus desa wisata pada beberapa desa perlu ditingkatkan dari level banjar ke level desa dinas. Hal ini untuk menghindari konflik akibat kecemburuan sosial yang terjadi pada tingkat desa dinas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan artikel ini didukung oleh bantuan berbagai pihak, baik berupa dukungan keuangan, informasi, maupun pemikiran. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak LPPM Universitas Udayana dan Fakultas Pariwisata yang telah memberikan dukungan pendanaan penelitian melalui skim Hibah Unggulan Program Studi tahun 2017. Demikian juga penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi Tim Verifikasi Desa Wisata Kabupaten Gianyar sehingga dapat melakukan penelitian

sekaligus menjalankan tugas sebagai Tim Verifikasi. Rasa terima kasih juga dihaturkan kepada pihak sembilan desa wisata di Gianyar dan Forum Komunikasi Desa Wisata Gianyar yang selalu terbuka dalam memberikan informasi kepada penulis selama penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiquni, M., 2009, *Pariwisata dan Krisis Lingkungan Global* dalam buku *Pariwisata berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global*, Denpasar: Udayana Press.
- Dewi, M.H.U., dkk, 2013, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali*, Jurnal Kawistara Vol 3, Nomor 2, Agustus 2003, hlmn 129-139, Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana.
- Fandeli, C. Raharjana, D.T. Kaharudin, 2003, *Pengembangan Kawasan Pedesaan sebagai Obyek Wisata (Perencanaan Model Kelembagaan, Pasar dan Paket Wisata Pedesaan Sekitar Gunung Merapi)* Yogyakarta. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.
- Inskip, E., 1991, *Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach*, New York, Van Nostrand Reinhold.
- Oppermann, M. & K.S. Chon, 1997, *Tourism in developing countries*, London: International Thomson Business Press.
- Page, S.J. & Getz, D, 1997, *The Business of rural tourism*, London: International Thomson Business Press.
- Pearce, D, 1995, *Tourism a Community Approach*, 2nd, Harlow Longman.
- Rahman, Fadilal. 2009. 'Menimbang Prospek Desa Wisata', Harian Jogja, Kamis, 12 Maret 2009.
- Soekadji, R.G. 2000, *Anatomi Pariwisata*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.